



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI**



LAPORAN TAHUNAN 2019

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



Jl. Pendidikan No.2 Mataram



(0370) 7505330



bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id



@kesbangpntb



fb.com/bakesbangpoldagriprovntb

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya, penyusunan Laporan Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB Tahun 2019 dapat dibuat secara tepat waktu. Pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang tertuang dalam laporan ini secara keseluruhannya menggunakan APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB Tahun 2019. Pada dasarnya semua program dan kegiatan telah dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun realisasi keuangan sebesar 93,43%. Adapun kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena karena terlambatnya proses penerbitan SP2D oleh BPKAD terhadap kegiatan-kegiatan lain yang telah selesai dilaksanakan.

Laporan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB Tahun 2019 ini tidak hanya menjadi bahan pertanggung-jawaban, akan tetapi dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang. Semoga kendala dan hambatan selama tahun 2019 yang diungkap dalam laporan ini menjadi pelajaran sehingga kinerja Tahun 2020 dapat ditingkatkan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsinya baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan maupun dalam penyusunan laporan ini, tidak lupa kami sampaikan terima kasih.

Mataram, Maret 2020

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri Propinsi NTB



Ir. H. MOHAMMAD RUM, MT

Pembina Utama Muda
NIP. 1966016 199402 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Dasar Hukum.....	2
D. Sistematika Penulisan	4
BAB II KONDISI UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	5
A. Struktur Organisasi	5
B. Kepegawaian	16
C. Pengelolaan Asset	17
BAB III KEBIJAKAN DAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2019	19
A. Kebijakan	19
B. Program/Kegiatan.....	20
BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	22
A. Sekretariat.....	22
B. Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik.	26
C. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan.....	33
D. Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas	38
BAB V PELAKSANAAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019.....	42
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	44
BAB VII PENUTUP	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bakesbangpoldagri Provinsi NTB	5
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah pengawai Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dirinci berdasarkan tingkat Pendidikan	16
Tabel 2.2	Jumlah pengawai Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dirinci berdasarkan Pangkat dan Golongan	17
Tabel 2.3	Jumlah pengawai Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dirinci berdasarkan Jabatan.....	18
Tabel 4.1	Prasarana kantor yang diadakan tahun 2019	24
Tabel 4.2	Tempat dan Waktu Pelaksanaan Sosialisasi Anti Narkoba Dan Desa Bersinar Bagi Masyarakat Desa di Kab./Kota Provinsi NTB	36
Tabel 4.3	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Bimtek Masyarakat untuk Mendukug Desa Bersinar Se – Kab./Kota Provinsi NTB	37
Tabel. 5.1	Pagu Anggaran Murni dan Perubahan TA. 2019	42
Tabel. 5.2	Realiasi anggaran TA. 2019	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Aset pada Kantor Bakesbangpoldagri Provinsi NTB	47
Lampiran 2	Daftar Hibah yang diberikan kepada masyarakat/kelompok masyarakat/Ormas/LSM	59
Lampiran 3	Lokasi pemetaan Desa Bersinar TA. 2020	60
Lampiran 4	Bantuan Keuangan Parpol 2019	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjelang akhir tahun 2019, berbagai permasalahan masih mewarnai situasi dan kondisi stabilitas daerah Provinsi NTB yang salah satunya adalah masih adanya beberapa potensi konflik di beberapa wilayah kabupaten/kota. Berbagai upaya telah dilakukan dengan metode dan pendekatan yang dianggap sesuai dalam rangka mengatasi konflik tersebut. Meskipun telah dilakukan penanganan konflik melalui pendekatan kultural (budaya lokal), keamanan, dan penegakan hukum, namun masih juga belum menunjukkan hasil yang optimal. Salah satu sebab terjadinya konflik ini karena masih rendahnya pemahaman akan wawasan kebangsaan dan masih minimnya perhatian dan pengawasan Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota) terhadap gerakan-gerakan dari kelompok garis keras yang senantiasa memanfaatkan moment-moment tertentu sebagai pemicu konflik. Disamping itu, faktor lainnya seperti pemahaman agama yang berbeda, kesenjangan ekonomi, karakteristik budaya dan lain sebagainya.

Namun demikian, kita masih patut bersyukur karena pembangunan kehidupan politik masyarakat NTB menunjukkan adanya kemajuan dan perbaikan yang cukup signifikan salah satu kemajuan kehidupan politik tersebut bisa dilihat dari angka partisipasi pada pemilu 2019 dengan tingkat partisipasi mencapai 80,9% di atas target nasional yakni 76%. Meski kewajiban partai politik untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat belum sepenuhnya dilaksanakan, namun pemerintah sudah termasuk berhasil dalam memperbaiki kehidupan politik masyarakat NTB, tidak berhenti sampai disana pemerintah masih terus mengambil inisiatif dan tanggung jawab dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat.

Gambaran kondisi sosial dan politik masyarakat NTB diatas telah menjadi acuan penyusunan Program/Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB, sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2019 – 2023 dan Renstra Bakesbangpoldagri Provinsi NTB Tahun 2019 - 2023. Bakesbangpoldagri Provinsi NTB terus berupaya untuk menciptakan stabilitas daerah yang mantap guna mendukung pembangunan di berbagai bidang. Dimaklumi bersama bahwa tanpa dukungan stabilitas yang mantap, mustahil

program-program unggulan daerah berjalan dengan baik dan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Begitu pula sebaliknya kegagalan bidang pembangunan lainnya akan memicu terjadinya instabilitas dan oleh karena itu semua bidang perlu dibangun secara paralel, simultan dan bersinergis guna memberikan hasil yang optimal.

Sepanjang tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB telah melakukan berbagai kegiatan yang pendanaannya melalui APBD Provinsi NTB yang dapat digambarkan dalam Laporan Tahunan ini.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB Tahun 2019 adalah untuk menyediakan informasi tentang pelaksanaan program/kegiatan dan keuangan selama satu periode pelaporan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Laporan Tahunan ini adalah terwujudnya pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Wilayah-wilayah Daerah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan-Badan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
9. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 900-973 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2020;
11. Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 954-81 Tahun 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Saruan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 188.4/04.c/I/BKBPDN/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020;
13. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 188.4/03.c/I/BKBPDN/2020 tentang Penunjukan

Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020;

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 49/DPA/TAPD/2020, tanggal 21 Oktober 2019.

D. Sistematika Pelaporan

Laporan Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Bab I Pendahuluan
4. Bab II Kondisi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB
5. Bab III Kebijakan dan Program Kerja
6. Bab IV Pelaksanaan Kegiatan
7. Bab V Keuangan
8. Bab VI Masalah dan Solusi
9. Bab VII Program Kerja Tahun 2019

BAB II

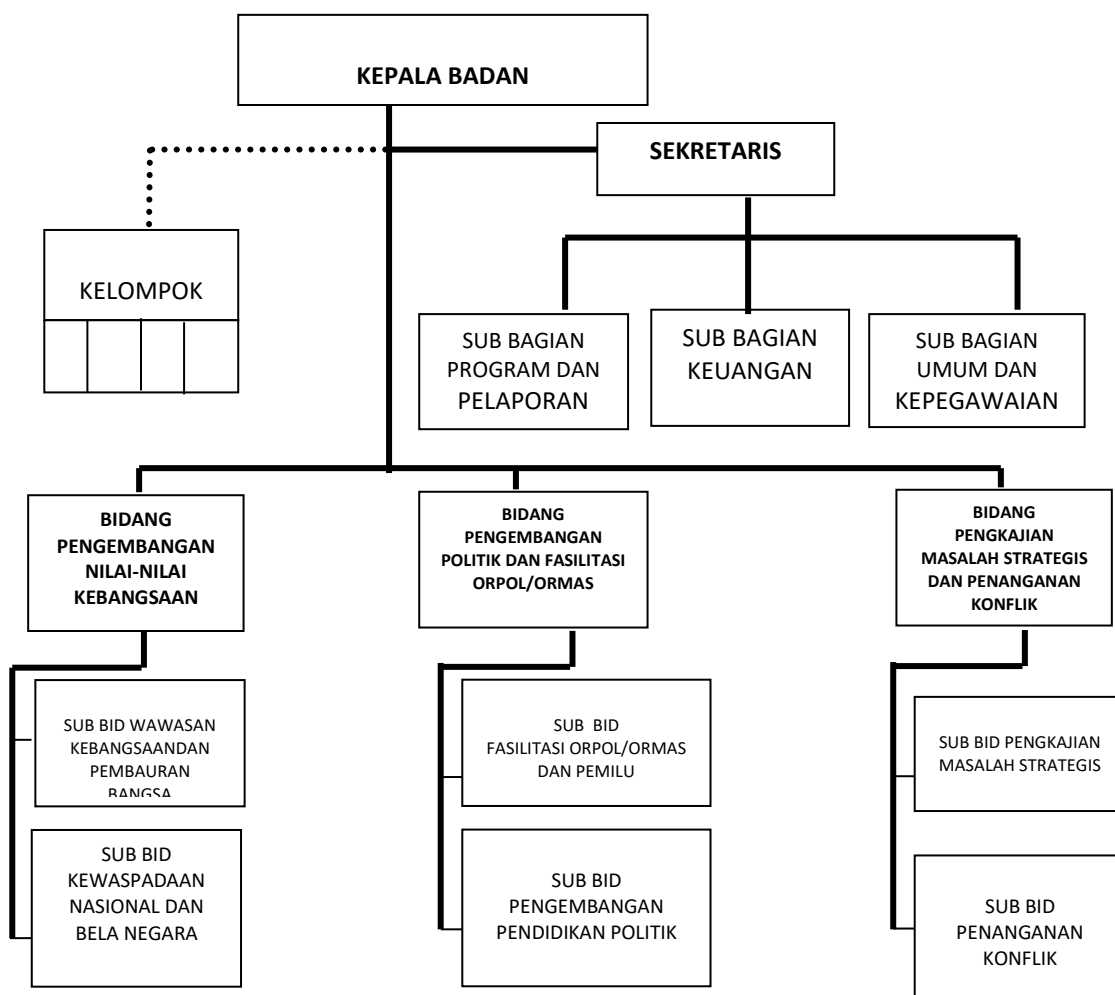
KONDISI UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

A. Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB adalah salah satu SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang dibentuk berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pergub NTB Nomor 41 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB. Adapun struktur organisasi seperti pada Gambar 2.1 dibawah ini.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Bakesbangpoldagri Provinsi NTB



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur NTB No. 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB, pada paragraf 1 pasal 85 disebutkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB sebagai berikut:

a) Tugas pokok

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

b) Fungsi

- (1) Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- (2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- (3) Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- (4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- (5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural dan Fungsional

- (1) Kepala Badan
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - (a) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - (b) Sub Bagian Keuangan;
 - (c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan terdiri dari :
 - (a) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
 - (b) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara.
- (4) Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas terdiri dari:
 - (a) Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Politik;
 - (b) Sub Bidang Fasilitasi Orpol/Ormas dan Pemilu.

(5) Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik terdiri dari :

- (a) Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis;
- (b) Sub Bidang Penanganan Konflik.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Kepala Badan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Provinsi (desentralisasi) di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- (a) Penyusunan program dan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- (b) Pemberian dukungan atas urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- (c) Penyediaan dukungan penyelenggaraan pemiihan umum;
- (d) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
- (e) Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- (f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- (a) Pelaksanaan persiapan perumusan kebijakan dan koordinasi;
- (b) Pengelolaan urusan keuangan; dan
- (c) Pelaksanaan pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan keprotokolan.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, membawahi:

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

Tugas:

Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan

Rincian tugas:

1. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, program dan pelaporan;
2. Menghimpun dan menganalisa data dalam rangka program dan pelaporan ;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pelaporan;
4. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan;

Tugas:

Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan

Rincian Tugas:

1. Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
2. Menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;
3. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Badan baik rutin maupun pembangunan;
4. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
5. Mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta penyiapan tindak lanjut;
6. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas:

Melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan di lingkungan Badan.

Rincian Tugas:

1. Melakukan urusan ketatausahaan;
2. Melakukan urusan kepegawaian;
3. Melaksanakan urusan perlengkapan;
4. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;
5. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

(3) Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan

Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- (a) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan;
- (b) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan ideologi dan pengembangan kewaspadaan nasional;
- (c) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembauran bangsa dan kewarganegaraan;
- (d) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan bela negara;
- (e) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi sumber daya pranata sosial dan budaya bangsa; dan
- (f) Evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan.

Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan, membawahi:

a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa

Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, kewarganegaraan, sumber daya pranata sosial dan budaya bangsa.

Rincian Tugas:

1. Menyusun rencana/program kerja;
2. Monitoring dan evaluasi di bidang wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa;
3. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara.

Tugas:

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan kewaspadaan nasional, ideologi dan pemantapan Bela Negara.

Rincian Tugas:

1. Menyusun rencana/program kerja;
2. Monitoring dan evaluasi di bidang kewaspadaan nasional dan bela negara;
3. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan.

(4) Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas

Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pengembangan politik dan fasilitasi orpol/ormas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas menyelenggarakan fungsi:

- (a) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan etika politik;

- (b) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi Pendidikan politik;
- (c) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan budaya politik;
- (d) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan konstitusi dan perundang-undangan politik;
- (e) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi lembaga perwakilan;
- (f) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemilihan umum;
- (g) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan partisipasi politik;
- (h) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi politik;
- (i) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemantauan dan pelaporan;
- (j) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan parpol;
- (k) Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengembangan organisasi profesi;
- (l) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan organisasi keagamaan dan Lembaga Swadaya masyarakat;
- (m) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan organisasi kemasyarakatan; dan
- (n) Evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan politik dan fasilitasi orpol/ormas.

Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas, membawahi:

a. Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Politik;

Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan etika politik, Pendidikan

politik, budaya politik, pelaksanaan konstitusi dan perundang-undangan politik, serta komunikasi dan sosialisasi politik.

Rincian Tugas:

1. Menyusun rencana/program kerja;
2. Monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan Pendidikan politik;
3. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Sub Bidang Fasilitasi Orpol/Ormas dan Pemilu.

Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan parpol, pengembangan organisasi profesi, pemberdayaan organisasi keagamaan dan Lembaga swadaya masyarakat, pengembangan organisasi kemasyarakatan, Lembaga perwakilan, pemilihan umum, pengembangan partisipasi politik, pemantauan dan pelaporan.

Rincian Tugas:

- (1) Menyusun rencana/program kerja;
- (2) Monitoring dan evaluasi di bidang Fasilitasi Orpol/Ormas dan Pemilu;
- (3) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas.

(5) Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik

Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pengkajian masalah strategis dan penanganan konflik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

- (a) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi koordinasi pelaksanaan pengkajian masalah strategis bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, hak asasi manusia, ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
- (b) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi analisis potensi konflik sosial;
- (c) Penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penangkalan gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- (d) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan rekonsiliasi sosial;
- (e) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan dan keamanan;
- (f) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan kapasitas;
- (g) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- (h) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pengkajian masalah strategis dan penanganan konflik.

Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik, membawahi:

a. Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis;

Tugas:

Melaksanakan penyiapan strategis yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, social budaya, hak asasi manusia, bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi koordinasi pelaksanaan pengkajian masalah ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.

Rincian Tugas:

1. Menyusun rencana/program kerja;
2. Monitoring dan evaluasi di bidang pengkajian masalah strategis;
3. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Sub Bidang Penanganan Konflik

Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan analisis potensi konflik, pencegahan dan penangkalan gangguan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, rekonsiliasi sosial, penanganan konflik pemerintah dan keamanan, pengembangan kapasitas, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Rincian Tugas:

1. Menyusun rencana/program kerja;
2. Monitoring dan evaluasi di bidang penanganan konflik;
3. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Masing-masing Sub Bidang, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari beberapa Jabatan Fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Kepegawaian

Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB terhitung sampai 31 Desember 2019 berjumlah 49 orang. Kondisi kepegawaian ditinjau dari beberapa segi yaitu segi pendidikan, kepangkatan, golongan dan jabatan.

1. Tingkat Pendidikan

Kondisi kepegawaian berdasarkan tingkat Pendidikan dapat diuraikan berdasarkan Table 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Jumlah pegawai Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dirinci berdasarkan tingkat Pendidikan

NO.	Uraian	Tahun 2016 (Orang)	Tahun 2017 (Orang)	Tahun 2018 (Orang)	Tahun 2019 (Orang)
1.	Pendidikan Doktoral / S-3	0	0	0	0
2.	Pendidikan Pasca Sarjana / S-2	7	7	6	4
3.	Pendidikan Sarjana / S-1	28	28	27	27
4.	Pendidikan Diploma / D.IV	0	0	0	0
5.	Pendidikan Diploma / D.III	1	1	0	0
6.	Pendidikan Diploma / D.I	0	0	0	0
7.	Pendidikan SMK	0	0	0	0
8.	Pendidikan SMA	16	16	17	16
9.	Pendidikan SMPK	0	0	0	0
10.	Pendidikan SMP	1	1	0	0
11.	SD	5	5	2	2
12.	Jumlah	58	58	52	49

Berdasarkan tabel di atas bahwa dari total pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB sebanyak 49 orang didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan S1 yakni sebanyak 27 orang (55,10%), SMA 16 orang (32,65%) kemudian disusul dengan pegawai dengan Pendidikan S2 sebanyak 4 orang (8,16%) dan SD sebanyak 2 orang (4,08%). Apabila dilihat dari persentase tingkat Pendidikan maka keberadaan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB sudah menunjukkan tingkat pengetahuan teknis dan keterampilan yang memadai.

2. Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB berdasarkan pangkat dan golongan sampai dengan 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB dirinci berdasarkan pangkat dan golongan

No.	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2017	Tahun 2019
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	0	0	1	0
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	1	1	2
3.	Pembina Tk.I (IV/b)	3	3	4	5
4.	Pembina (IV/a)	8	8	2	1
5.	Penata Tk.I (III/d)	12	12	12	12
6.	Penata (III/c)	1	1	3	5
7.	Penata Muda Tk.I (III/b)	9	9	6	2
8.	Penata Muda (III/a)	7	7	6	6
9.	Pengatur Tk.I (II/d)	1	1	1	4
10.	Pengatur (II/c)	4	4	6	6
11.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	7	7	6	4
12.	Pengatur Muda (II/a)	4	4	3	1
13.	Juru Tk.I (I/d)	1	1	0	0
14.	Juru (I/c)	2	2	1	1
15.	Juru Muda Tk.I (I/b)	0	0	0	0
16.	Juru Muda (I/a)	0	0	0	0
	Jumlah	58	58	52	49

Dari Tabel 2.2 di atas terlihat bahwa kondisi kepangkatan dan golongan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB hampir sama dengan tahun 2018 dan di dominasi oleh golongan III/d. Untuk beberapa pegawai pada tahun 2019 ada yang memasuki purna tugas sebanyak 4 orang dan ada beberapa pegawai yang mengalami kenaikan pangkat dan golongan. Dari segi kepangkatan terlihat bahwa sebagian besar pegawai Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB ada pada Golongan III meskipun dari segi pendidikan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

3. Jabatan

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB berdasarkan eselonisasi dan jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3 Jumlah pegawai Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dirinci berdasarkan jabatan

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1.	Eselon II	1	1	1	1
2.	Eselon III	4	4	3	4
3.	Eselon IV	9	9	8	9
4.	JabatanFungsionalUmum	44	44	36	31
5.	JabatanFungsionalTertentu	0	0	4	4
	Jumlah	58	58	52	49

Dari tabel 2.3 diatas, terlihat bahwa seluruh posisi jabatan struktural telah terisi dan sampai 2019 sebanyak 14 jabatan struktural dan 4 fungsional tertentu (pranata komputer pertama) serta 31 jabatan fungsional umum memenuhi struktur kepegawaian pada Bakesbangpoldagri Provinsi NTB.

C. Pengelolaan Aset

Daftar Asset pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB yang tercatat di Tahun 2019 dapat dilihat pada *lampiran 1*.

BAB III

KEBIJAKAN DAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2019

A. Kebijakan

1. Strategi

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana dimuat didalam Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpoldagri Provinsi NTB Tahun 2019-2023, maka dibuat strategi dengan rumusan sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta meningkatkan kualitas SDM dalam mendukung kinerja organisasi.
- b. Sosialisasi, mobilisasi dan edukasi masyarakat yang diarahkan pada budaya tertib.
- c. Pelatihan, Bimtek dan edukasi masyarakat yang diarahkan pada penguatan kemandirian dan ketertiban lingkungan.
- d. Sosialisasi, mobilisasi dan edukasi masyarakat yang diarahkan 4 pilar kebangsaan.
- e. Edukasi, matrikulasi dan fasilitasi perwujudan suasana politik yang santun dan bertanggungjawab yang diarahkan pada Pendidikan Kesadaran Politik Masyarakat.
- f. Matrikulasi, mobilisasi dan fasilitasi Ormas dan Orpol yang diarahkan pada Kepekaan terhadap masalah social politik.
- g. Koordinasi, sosialisasi, fasilitasi dan edukasi kepada masyarakat yang diarahkan pada ideologi nasional dan budaya daerah.
- h. Fasilitasi Ormas dan Orpol yang diarahkan pada kepekaan terhadap masalah social politik.
- i. Koordinasi penguatan aturan hukum yang diarahkan pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- j. Koordinasi dan mobilisasi pencegahan dan penanganan penyebaran dan penggunaan narkoba yang diarahkan pada kalangan generasi muda, aparatur dan masyarakat.
- k. Sosialisasi, koordinasi dan deradikalisasi kepada masyarakat yang diarahkan pada nilai-nilai keagamaan.
- l. Sosialisasi, koordinasi, dan fasilitasi kepada masyarakat yang diarahkan pada masyarakat rawan konflik.

2. Arah Kebijakan

Kebijakan Umum:

- a. Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antar etnik dan kelompok sosial;
 - b. Mendorong komunikasi lintas budaya dalam masyarakat multikultur;
 - c. Memfasilitasi forum komunikasi antar umat, etnis, kelompok dan daerah
- Kebijakan Teknis;
- a. Peningkatan daya dukung sarana & prasarana perkantoran;
 - b. Tata kelola keuangan yang transparan;
 - c. Pembangunan partisipatif, komprehensif dan koordinatif;
 - d. Kerjasama dengan aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat/budaya;
 - e. Kondusifitas lingkungan kemasyarakatan;
 - f. Landasan kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - g. Mengembangkan pola rekrutmen dan kaderisasi orpol dan ormas;
 - h. Kerjasama pemerintah dengan organisasi masyarakat dan organisasi politik;
 - i. Kerjasama antara organisasi politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat/budaya;
 - j. Penguatan Parpol dan Ormas;
 - k. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - l. Kerjasama dengan aparat penegak hukum, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat/Budaya dan Lembaga Pendidikan;
 - m. Mengembangkan fungsi lembaga dan majelis keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan Lembaga adat/budaya.

B. Program/Kegiatan

Penyelenggaraan urusan wajib dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ditahun 2019 Bakesbangpoldagri Provinsi NTB sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan 9 program terdiri atas 25 kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan

- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- h. Penyediaan makanan dan minuman
- i. Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
- j. Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor
 - d. Rehabilitasi sedang/berat rumah Gedung kantor
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Peningkatan mental dan fisik aparat
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan rencana kerja SKPD
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah
- 6) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
 - b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- 7) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan
 - a. Forum Pengendalian Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 8) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
 - a. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
- 9) Program Pendidikan politik masyarakat
 - a. Penyuluhan kepada masyarakat.
 - b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - c. Peningkatan peran partai politik (parpol) dan organisasi masyarakat (ormas).

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Sekretariat

Terdapat 5 (lima) program dan 18 (delapan belas) kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat dengan hasil sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Bentuk dari pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan pengadaan materi, peranko dan pengiriman barang dan/atau dokumen kantor. Adapun pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.038.000,- dengan realisasi Rp. 887.000,- (85.45%) dan realisasi fisik 100%. Sisa anggaran sebesar Rp. 151.000,- telah dikembalikan ke kas daerah.

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bentuk pelaksanaan dari kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik ada 3 (tiga) yaitu terpenuhi kebutuhan akan jasa telepon, jasa air bersih dan kebutuhan listrik selama satu tahun. Adapun pagu anggaran Rp. 73.455.481,- dengan realisasi sebesar Rp. 71.631.081,- (97.52%) dan realisasi fisik 100%. Sisa anggaran sebesar Rp. 1.824.400,- (2,48%) telah dikembalikan ke kas daerah.

3) Penyediaan jasa administrasi keuangan

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan berupa pemberian honorarium kepada Pengelola Keuangan seperti Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pencatat Pembukuan, Pembuat Datar Gaji, Pembuat Dokumen dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pemberian insentif berupa honor ini dimaksudkan untuk memotivasi petugas pengelola keuangan dan PPK di atas agar bisa berkerja dengan optimal sehingga target yang di tetapkan bisa tercapai. Adapun pagu Anggaran Rp. 80.252.000,- dengan realisasi Rp. 80.252.000,- dan realisasi fisik 100%.

4) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor berupa pengadaan alat kebersihan kantor , pembayaran jasa cleaning service 9 (sembilan) orang

serta pembayaran jasa keamanan kantor 7 (tujuh) orang. Pagu anggaran Rp. 396.240.220,- dengan realisasi Rp. 396.237.120,- dan realisasi fisik 100%. Adapun output kegiatan ini adalah kondisi dan lingkungan Kantor Bakesbangpoldagri Provinsi NTB bersih dan suasana kerja yang aman.

5) Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)

Terpenuhinya kebutuhan ATK dengan pagu anggaran Rp. 50.023.500,- dapat terpenuhi secara keseluruhan dan realisasi fisik 100%.

6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan berupa cetak BKU, SSHP, SPJ Keuangan, Amplop ber-kop, dan foto copy surat, Absen dan dokumen lainnya dengan pagu anggaran Rp. 11.745.200,- dengan realisasi Rp. 11.738.900,- (99,95%) dan realisasi fisik 100%.

7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Bentuk kegiatan ini berupa pelayanan informasi dan publikasi kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik cetak Baliho, spanduk dan belanja surat kabar/majalah. Pagu anggaran Rp. 104.960.000,- dengan realisasi Rp. 104.090.000,- (99,17%) dan realisasi fisik 100% .

8) Penyediaan makanan dan minuman

Bentuk kegiatan ini berupa penyediaan makanan dan minuman untuk pelaksanaan rapat-rapat internal, rapat dengan mitra dan jamuan tamu dengan pagu anggaran Rp. 60.000.000,- dengan realisasi Rp. 59.994.500,- (99,99%) dan realisasi fisik 100% .

9) Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah

Merupakan kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah untuk keperluan Konsultasi/Koordinasi/Rapat Teknis ke Jakarta dan Daerah Lainnya di Indonesia. Total pagu untuk kegiatan ini sebesar Rp. 122.400.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 122.009.000,- (99,75%) dan realisasi fisik 100%.

10) Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ditujukan untuk menyelaraskan program sehingga tercipta persamaan persepsi dalam pencapaian tujuan. Kegiatan ini berupa

perjalanan dinas dalam daerah dan rapat koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan. Rapat koordinasi telah dilaksanakan di Aula rapat Bakesbangpoldagri provinsi NTB pada tanggal 14 s/d 15 November 2019 dengan peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari 10 orang peserta Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dan 20 orang peserta dari Bakesbangpoldagri Kab/Kota. Pelaksanaa Rakor berjalan sesuai dengan rencana, akan tetapi pada pelaksanaan rakor ada 2 utusan Kab/Kota yang tidak hadir karena keterbatasan anggaran dan karena ada kesibukan penting lainnya, sehingga untuk memenuhinya diikutkan peserta dari Bakesbangpoldagri Provinsi NTB (Laporan pelaksanaan Rakor secara lengkap di buat terpisah dengan laporan ini).

Total pagu untuk kegiatan penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 149.967.779,- dengan realisasi Rp. 149.920.348,- (99,97%.) dan realisasi fisik 100% .

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pengadaan peralatan Gedung kantor

Pengadaan peralatan Gedung kantor selama tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Prasarana kantor yang diadakan tahun 2019

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
1.	Pengadaan Laptop/Notebook	2	Buah
2.	Pengadaan Printer	2	Buah
3.	Pengadaan Scanner	2	Buah

Kebutuhan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 51.461.000,- dengan realisasi Rp. 49.633.000,- dan realisisa fisik 100%.

2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional berupa penggantian suku cadang, belanja bahan bakar dan pelumas kendaraan, serta perpanjangan STNK dengan pagu anggaran Rp. 176.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 164.721.633,- (93,22%) dan realisasi fisik 100%. Adapun jumlah kendaraan yang dipelihara melalui kegiatan ini yaitu roda dua (22 unit) dan Roda Empat (9 Unit).

Sisa anggaran Rp. 11.978.367,- (6,78%) merupakan efisiensi dan telah dikembalikan ke kas daerah.

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor berupa pemeliharaan AC (12 unit), pemeliharaan Komputer dan Laptop, pemeliharaan printer (8 unit), dan Peralatan Kantor Lainnya dengan pagu anggaran Rp. 35.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 35.000.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.

4) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor berupa Rehab/Rekon Gedung kantor sebagai akibat dari Bencana Alam gempa bumi pada Agustus 2018. Pagu anggaran Rp. 151.248.000,- dengan realisasi Rp. 150.350.000,- (99,41) dan realisasi fisik 100% dari sisa anggaran sebesar Rp. 898.000,- (0,59%) telah dikembalikan ke kas daerah.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

a. Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur

Kegiatan Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur berupa peningkatan Iman dan Taqwa (Imtaq) yang dilaksanakan dua kali seminggu dan pembinaan fisik Aparatur berupa olah raga (senam). Jadi bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan ini yaitu berupa pembayaran honor instruktur senam dan penceramah untuk Imtaq dengan pagu anggaran Rp. 15.600.000,- dengan realisasi Rp. 12.800.000,- (82,05%), realisasi fisik mencapai 100% dan sisa anggaran Rp. 2.800.000,- merupakan efisiensi karena kegiatan pada bulan Ramadhan ada yang dilaksanakan secara gabungan di Kantor Gubernur.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan ini diperuntukkan untuk membayar honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / LAKIP Tahun 2019, Penyusunan Laporan Tahunan

Tahun 2019 dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019, pengadaan alat tulis, fotocopy dokumen dan penjilidan dokumen kantor dengan pagu anggaran Rp. 64.414.880,- dengan ralisasi Rp. 64.400.000,- (99,98%) dan realisasi fisik 100% dengan sisa anggaran 14,880.00 (0,02%).

2) Penyusunan rencana kerja SKPD

Pelaksanaan kegiatan ini berupa pemberian honorarium Tim Penyusun Dokumen RKA 2020 & RKAP 2019, Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 dan penyusunan Renstra 2019-2023, pembayaran jasa tenaga operator simda, pengelola website dengan pagu anggaran Rp. 178.621.500 dengan realisasi sebesar Rp. 178.618.300 (100%) dan realisasi fisik 100%.

5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Manajemen Asset/barang Milik Daerah yaitu Pemberian Honorarium Petugas Pengelola Asset dan ATK Kegiatan Manajemen Asset atas upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pelaporan asset dengan pagu anggaran Rp. 19.700.000,- dengan realisasi Rp. 19.700.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.

B. Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik

1. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan

Keamanan merupakan faktor yang sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya jaminan keamanan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah dan lancar. Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 10 Kabupaten/Kota merupakan salah satu wilayah zona merah terkait konflik sosial. Akan tetapi seiring dengan intensifnya melakukan penggalian informasi melalui deteksi dini, cegah dini, temu cepat dan lapor cepat yang dilakukan oleh segenap mitra Bakesbangpoldagri Provinsi NTB di lapangan di tambah dengan rekomendasi dan direktif yang diberikan oleh Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) menghantar Provinsi NTB keluar dari zona merah konflik sosial sejak tahun 2017. Untuk mempertahankan kondisi ini pada tahun 2019 telah dilaksanakan secara efektif :

1) Forum Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Bentuk dari kegiatan ini berupa :

1.1 Meningkatkan Sinergitas Pimpinan Daerah dalam Mewujudkan Kondusifitas Daerah.

Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah fasilitasi terhadap para pimpinan daerah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dalam melakukan berbagai upaya untuk menjaga kondusifitas daerah secara terintegrasi dan terpadu. Beberapa Rapat Koordinasi (Rakor) telah dilakukan dan berbagai kebijakan telah diambil pada tahun 2019 sehingga potensi-potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) serta konflik sosial dapat dicegah baik yang terjadi di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa, beberapa Rapat koordinasi telah dilakukan, seperti

- a. Rakor pertama dengan Tema Penandatanganan Kesepakatan Perdamaian Warga Lingkungan Karang Genteng Kota Mataram Dengan Warga Desa Bajur Kabupaten Lombok Barat, Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, pukul 09.45 s.d 10.35 Wita, bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB Jl. Pejanggik Kota Mataram, yang dipimpin oleh Gubernur NTB, Kapolda NTB, Kajati NTB dan Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB;
- b. Rakor ke-2 antara Jajaran Forkopimda NTB dengan Ketua Tim Pemantau Desk Koordinasi Pemilu Kemenko Polhukam tahun 2019 dalam kunjungan kerja kesiapan akhir Pemilu serentak 2019 di Provinsi NTB Pada tanggal 31 Januari 2019, pukul 10.30 Wita, di Aula Kantor Kesbangpoldagri Provinsi NTB Jl. Pendidikan Kota Mataram.
- c. Rapat Koordinasi dengan Tema “Illegal Mining” (Kerusakan Lingkungan) yang di akibatkan oleh penambangan illegal Pada hari senin, tanggal 29 Juli 2019 pukul 13.40 Wita bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, yang di hadiri oleh undangan berjumlah \pm 70 Orang, diantaranya .

- Gubernur NTB Dr. H. Zulkiflimansyah
 - Kapolda NTB Brigjen Pol Nana Sudjana
 - Kabinda Provinsi NTB H. Tarwo Kusnarno
 - DanRem 162/ WB. Kol. Czi A. Rizal Ramdhani S.Sos .SH.M
 - Kajati NTB Arif, SH.,MH
- d. Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTB dan Kominda bersama Bupati/Walikota se-NTB pada hari Kamis, tanggal 3 September 2019 pukul 13.45 s.d 16.15 Wita, di Ruang Rapat Binda NTB, Kota Mataram, Rapat dipimpin langsung Gubernur NTB, Zulkiflimansyah didampingi Kabinda NTB, Tarwo Kusnarno SE., M.Si, Ketua DPRD Prov NTB, Baiq Isvie Rupaeda, dan Kapolda NTB, Irjen Pol Nana Sudjana S.Ik, dihadiri sekitar 36 orang dari unsur Forkopimda NTB, antara lain: Kol (Czi) Ahmad Rizal (Danrem 162/WB), Arif (Kajati NTB), Kolonel (Nav) Budi Handoyo (Dan Lanud Rembiga), dll.
- e. Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 pukul 13.20 WITA, bertempat di RM Hj. Salma Karang Taliwang Jl. Ade Irma Suryani Karang Taliwang telah dilaksanakan Rapat koordinasi Lintas Instansi terkait perkembangan permasalahan NW (Nahdatul Wathan) yang di selenggarakan oleh Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dihadiri oleh perwakilan tokoh NW Anjani dan NW Pancor jumlah \pm 30 orang, diantaranya adalah Kepala Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Syafi'i, MM, Kabinda NTB, H.Tarwo Kusnarno, M.Si Dirintelkam Polda NTB, Kombespol Susilo Rahayu Irianto, dll
- f. Pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2019 pukul 09.55 WITA di Mayura Hall Lesehan Green Asri Jln. Ahmad Yani Sayang-Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram telah dilaksanakan Rakor dalam rangka Silaturahmi dan membahas masalah penambangan di desa prabu, PT. Gili Trawangan

Indah dan perubahan nama bandara, penangkapan terduga teroris dan antisipasi gaktibmas menjelang pilkada kemudian permasalahan tanah masyarakat yang di coreng-coreng di medsos yang akan berdampak besar terhadap situasi daerah, dan masalah PT. SMS di dompu. Kegiatan diselenggarakan oleh Kesbangpoldagri Provinsi NTB dan dihadiri sekitar 35 orang peserta rapat, diantaranya :

1. Dr. Iswandi (Plt Sekda NTB).
 2. Ir. Wahyudi Adisiswanto, M.Si (Kabinda NTB).
 3. H. M. Rum (Kaban Kesbangpoldagri Prov. NTB).
 4. Kolonel Inf Andi Baso, S.IP (Kabagduk Ops Binda NTB).
 5. Kombes Pol Drs Susilo Rahayu Irianto (Dir Intel Polda NTB).
 6. Kombes Pol Bagus Purna (Diresnarkoba Polda NTB).
 7. Mayor Inf. Zakaria (Pasi Komsos Korem 162/WB).
 8. Dr. H. Kresna Menon SH. M.Hum (Ketua Pengadilan Tinggi).
 9. Andi Dahrif (Kanwil Kemenkumham NTB.)
 10. M. Khuwailid S.Ag (Ketua Bawaslu NTB), dll
- g. Rapat Koordinasi dengan agenda Terkait SK Menteri Perhubungan RI Nomor 1421 Agenda Tahun 2018 Tentang Perubahan Nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (ZAM). Pada hari Rabu tanggal tanggal, 18 Desember 2019 pukul 10.12 wita bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat Jl. Pejanggik No.12, Pejanggik, Kota Mataram yang dihadiri diantaranya yaitu , oleh :
- 1) Gubernur NTB (Dr. H. Zulkifliemansyah, S.E, M.Sc)
 - 2) Wakil Gubernur NTB (Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd)
 - 3) Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB (Ir. Mohammad Rum, MT)
 - 4) Kabinda NTB (Bpk. Ir. Wahyudi Adisiswanto, M.Si)
 - 5) Danlanud ZAM (Kolonel Pnb. Andri Gandhy M. Sc)

- 6) Danlanal Mataram (Kolonel Laut (P) Dados Raino)
- 7) Kapolda NTB diwakilkan Staf Ops. Polda NTB AKBP Rustanto SH.
- 8) Danrem 162/WB diwakilkan Kasi Intel Korem 162/WB Mayor Inf. Hendra Sukma, dll

h. Pada hari Kamis, tanggal 3 September 2019, di Ruang Rapat Binda NTB, Kota Mataram, berlangsung Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTB dan Kominda bersama Bupati/Walikota se-NTB.

Rapat dipimpin langsung Gubernur NTB, Zulkiflimansyah didampingi Kepala BINDA NTB, Tarwo Kusarno SE., M.Si, Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, dan Kapolda NTB, Irjen Pol Nana Sudjana S.Ik, dihadiri sekitar ± 36 orang dari unsur Forkopimda NTB, antara lain :

1. Kol (Czi) Ahmad Rizal (Danrem 162/WB),
2. Arif, SH, MH (Kajati NTB),
3. Kolonel (Nav) Budi Handoyo (Dan Lanud Rembiga),
4. Kolonel Laut (P) Dados Raino (Dan Lanal Mataram),
5. Dr. H. Najmul Ahyar (Bupati KLU),
6. Sukiman Azmy (Bupati Lotim),
7. Drs. H. Fauzan Khalid, M. Ag. (Bupati Lobar),
8. Fud Syaifuddin, ST (Wakil Bupati Sumbawa Barat),
9. Hj. Indah Damayanti Putri, SE (Bupati Bima),
10. Perwakilan Walikota Mataram, Bupati Loteng, Bupati Sumbawa, Walikota Bima dan Bupati Dompu, serta unsur pimpinan OPD NTB lainnya.

1.2 Fasilitasi terhadap 15 orang Satgas Pendeteksian Dini Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba. Satgas Narkoba menjalankan tugasnya yaitu melakukan deteksi dini menghimpun informasi tentang penyalahgunaan narkoba serta memberikan saran/rekomendasi solusi yang akan diambil. Untuk mengetahui perkembangan penyalahgunaan narkoba, serta untuk mencegah

penyalahgunaan narkoba, satgas ini telah melaksanakan rapat koordinasi dengan berbagai Stakeholders diantaranya :-

- a. Rakor pendeteksian Dini Narkoba, Rakor pertama dilaksanakan di Hotel Montana Premier Senggigi Batulayar, Kab. Lombok Barat, selasa 2 Juli 2019, dengan peserta sebanyak 25 orang dari unsur Polda NTB, Kejati NTB, Binda NTB, Lanal Mataram, Lanud Rembiga, Bais TNI, Beacukai Mataram, Imigrasi Kls I Mtr, Satpol PP NTB, BP Pom NTB, Kesbangpoldagri Provinsi NTB, BNN NTB, Dinas Kesehatan Provinsi NTB.
 - b. Rakor pendeteksian Dini Narkoba II dilaksanakan pada Kamis, 05 September 2019, di Hotel Montana Premier Senggigi Batulayar, Kab. Lombok Barat dengan peserta sebanyak 25 orang dari unsur Lurah dan Kepala Desa di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat,
 - c. Rakor pendeteksian Dini Narkoba III, dilaksanakan di Hotel Montana Premier Senggigi Batulayar, Kab. Lombok Barat Senin, 30 September 2019 dengan peserta dari unsur dari Ketua BEM Universitas/Perguruan Tinggi yang ada di Kota Mataram dan Ketua OSIS dari SMA dan SMK yang ada di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat .
 - d. Rakor Pendeteksian Dini Narkoba IV dilaksanakan di Fave Hotel Jln. Langko No. 21 - 23, Dasan Agung, Selaparang, Kota Mataram, NTB Selasa, 15 Oktober 2019 dengan peserta dari unsur Kesbangpoldagri se Pulau Lombok dan Provinsi NTB, Polda, Korem 162/WB, Lanal Mataram, Lanud Rembiga, Bais TNI, Kejati, Bea Cukai, BNN, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Binda, Kantor Imigrasi Kls IA.
- 1.3 Fasilitasi kepada tim pengolah isu sebanyak 20 orang.
- 1.4 Sosialisasi Illegal Mining Kepada Penambang telah dilaksanakan pada 18 – 19 November 2019 bertempat di Hotel D'Max jln Raya By Pass BIL km 2 Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan peserta sebanyak 60 orang dari unsur penambang illegal Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan

Kabupaten Sumbawa Barat. Sementara untuk kegiatan sosialisasi kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Wanita dll Tidak dapat dilaksanakan karena terlambatnya proses penerbitan SP2D oleh BPKAD terhadap kegiatan-kegiatan lain yang telah selesai dilaksanakan.

- 1.5 Belanja hibah barang yang diberikan kepada masyarakat/kelompok masyarakat/Ormas/LSM berupa hibah mobil sebanyak 10 Unit dan pembangunan 1 Paket Pos jaga telah dilaksanakan 100%. Daftar Hibah yang diberikan kepada masyarakat/kelompok masyarakat/Ormas/LSM terlampir (*Lampiran 2*).

- 1.6 Penggalangan/Penyusapan/Elistasi Jejaring Deckin.

Untuk mendukung pelaksanaan sub-kegiatan ini telah dibentuk Tim Jejaring berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 300/112 Tahun 2017 tentang Pembentukan Jejaring Deteksi Dini dan Cegah Dini Gangguan Keamanan di Kab./Kota, Tim ini terdiri dari unsur Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Intelijen Daerah, Polda, Korem, Polres, Kodim, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, dll sebanyak 51 orang.

Tim ini bertugas membantu tugas-tugas anggota intelijen daerah dan FKDM dalam mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala/peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas baik nasional maupun regional.

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan merupakan salah satu program yang memberi kontribusi yang besar terhadap penurunan konflik sosial di Provinsi NTB dari target 21 kasus pada tahun 2019 dapat ditekan hingga yang terjadi hanya 7 kasus konflik sosial. Kondisi ini lebih baik dari kasus yang terjadi pada tahun 2018 yaitu 13 kasus dari target 27 kasus. Keberhasilan ini adalah keberhasilan seluruh elemen masyarakat dan tidak terlepas juga dari efektifnya kerja koordinasi pimpinan daerah sehingga memberi dampak positif bagi upaya pengamanan di lapangan.

Total pagu untuk program tersebut adalah sebesar Rp. 6.305.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 5.859.643.308,- (92,94%) dan realisasi fisik 99,20%. Sisa anggaran sebesar Rp 445.356.692,- (7,06%). Besarnya sisa anggaran karena adanya efisiensi pada belanja hibah, sisa anggran telah dikembalikan ke kas daerah.

C. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Berbagai kondisi riil yang terjadi di Indonesia saat ini yang menjadi dasar pemikiran perlunya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan adalah sebagai berikut:

- Penurunan rasa nasionalisme dan lemahnya rasa kebangsaan para komponen bangsa, termasuk anak didik kita sehingga ada yang tidak mampu menyebutkan teks pancasila secara utuh dan benar.
- Rasa apriori terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga banyak para siswa lebih mengidolakan tokoh fiksi dan selebritis dari pada tokoh nasional bangsa ini.
- Maraknya perkelahian antar pemuda, pelajar, mahasiswa yang dipicu oleh masalah-masalah sepele.
- Dekadensi moral yang disebabkan pengaruh globalisasi, dll.

Ini semua menjadi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) didepan mata kita. Oleh karena itu peningkatan pemahaman akan wawasan kebangsaan dan penguatan rasa nasionalisme perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya termasuk kepada para pendidik sebagai ujung tombak yang memberi kontribusi besar dalam pembentukan karakter bangsa. Oleh sebab itu, maka Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dalam Program Wawasan Kebangsaan melaksanakan 2 kegiatan, dan sebagai berikut :

- (2) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Bentuk kegiatan ini berupa fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan kepada 50 orang toga, toma, toda, todat se provinsi NTB bertempat di Hotel Grand Legi Mataram Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 6

November 2019 dan belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi dan lain-lain se- Provinsi NTB dengan pagu anggaran Rp. 233.269.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 228.206.300,- (97,83%) dan realisasi fisik 100%.

- (3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai Nilai Luhur Budaya Bangsa Kegiatan ini berupa Rapat koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dengan peserta sebanyak 35 orang pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 di Hotel Montana Senggigi, Kabupaten Lombok Barat dan Rapat koordinasi PPWK Provinsi NTB dengan peserta sebanyak 50 orang terdiri dari unsur Pokja PPWK dan Pejabat struktural Bakesbangpoldagri Provinsi NTB. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 4 November 2019 bertempat di Hotel Golden Palace Mataram.

Pagu anggaran untuk kegiatan tersebut adalah Rp. 149.835.200,- dan realisasi sebesar Rp. 146.629.286,- (97,86%) dengan realisasi fisik 100% dan sisa anggaran sd.bulan ini Rp. 3.205.914,- (2,14 %).

2. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Permasalahan narkoba di Indonesia memperlihatkan gejala ironik, ketika upaya penanggulangan gencar dilakukan oleh pemerintah bersama seluruh eksponen masyarakat, disaat itu pula proses penyebarannya semakin cepat dengan modus operandi yang beragam. Kondisi ini telah membawa Negara dan Bangsa kita dalam status Darurat Narkoba.

Logika ekonomi yang bekerja dibalik penyebaran massif narkoba tetap mengandalkan akumulasi keuntungan sebagai tujuan. Karena itu, kelompok usia anak-anak dan remaja dijadikan sebagai pasar empuk, mengingat kelompok usia ini berada dalam kerentanan yang tinggi akibat situasi psikologisnya yang labil dan didukung oleh ketidaktahuannya terhadap epidemic kini. Berdasarkan penelusuran fakta, ditemukan 85% penyalahguna narkoba berasal dari kelompok usia dini dengan usia saat pemakaian pertama berada pada usia 14 tahun.

Kondisi ini mengancam keselamatan generasi muda harapan bangsa, sehingga lahir program Desa Bersinar sebagai bentuk perlawanan dari Narkoba dengan serangkaian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
- 2) Pelaksanaan program/kegiatan ini sekaligus sebagai pelaksanaan program unggulan Gubernur/Wakil Gubernur NTB periode 2019 – 2023 yaitu **Desa Bersinar (Desa.Kel Bersih Narkoba)**.

Adapun rangkaian pelaksanaan kegiatan terdiri dari :

- Sosialisasi Desa Bersinar kepada Toga, Toma, Todat dan Kepala desa Lokus Bersinar Provinsi NTB, dengan peserta 50 Orang Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi informasi sekaligus meminta dukungan kepada Toga, Toma, Todat dan Kepala desa Lokus Desa Bersinar agar ikut berkontribusi untuk suksesnya pelaksanaan program dimaksud. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 09–10 Mei 2019 bertempat di Fave Hotel, Jl. Langko No.21-23, Dasan Agung, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
- Pembekalan fasilitator lokal sekolah perjumpaan provinsi NTB dengan peserta 50 orang terdiri dari Fasilitator Lokal Sekolah perjumpaan di Lokus Desa Bersinar, masing – masing Desa/Kelurahan sebanyak 5 orang se – Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membekali fasilitator tersebut dengan berbagai pengetahuan dan cara-cara yang akan dilakukan ketika nanti melakukan pendampingan dengan komunitasnya di lokasi masing-masing. Pembekalan fasilitator telah dilaksanakan pada tanggal 26 – 27 Juni 2019 bertempat di Hotel Puri Indah, Jalan Sriwijaya No. 132, Cilinaya, Cakranegara, Kota Mataram.
- Sosialisasi anti Narkoba dan Desa Bersinar untuk masyarakat desa, dimaksudkan sebagai informasi awal kepada masyarakat bahwa desanya telah ditetapkan sebagai lokasi sampel Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) yang keberhasilannya sangat tergantung pada dukungan seluruh komponen masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini telah

dilaksanakan secara paralel di 10 (sepuluh) lokasi Desa bersinar di masing-masing Kabupaten/kota se- NTB dengan peserta 50 orang.

Tabel 4.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Sosialisasi Anti Narkoba Dan Desa Bersinar Bagi Masyarakat Desa di Kab./Kota Prov.NTB

Kab./Kota	Waktu/Tempat	Kab./Kota	Waktu/Tempat
KSB	Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2019 bertempat di Kantor Desa Tano, Kecamatan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi NTB.	Sumbawa	Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2019 bertempat di Kantor Desa Labuhan, Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB
Dompu	Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2019 bertempat di Kantor Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Provinsi NTB.	Lobar	Kegiatan ini dilaksanakan di kantor Desa Midang Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB
Loteng	Kantor Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.	KLU	Kantor Desa Teniga, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.
Lotim	Kantor Desa Sapit, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur.	Mataram	Kantor Lurah Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

- Bimtek masyarakat untuk mendukung Desa Bersinar se-Kab/Kota Provinsi NTB, telah dilaksanakan secara paralel pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota se-NTB dengan peserta berjumlah 50 orang di masing-masing lokasi (10 lokus) desa bersinar. Kegiatan ini dimaksudkan selain untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, juga dimaksudkan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan praktis yang menggunakan bahan baku yang banyak dan tersedia di desa tersebut.

Tabel 4.3 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Bimtek Masyarakat untuk Mendukug Desa Bersinar Se – Kab./Kota Provinsi NTB

Kab./kota	Waktu/Tempat	Kab./Kota	Waktu/Tempat
Bima	Kantor Desa Panda Kecamatan Palibelo, Kab. Bima Provinsi NTB Tahun 2019. Tanggal 21 dan 22 November 2019.	Sumbawa	Kantor Desa Labuhan, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Tanggal 26 dan 27 September 2019.
Lobar	Kantor Desa Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2019.	Dompu	Kantor Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Tanggal 17 dan 18 Oktober 2019.
KSB	Kantor Desa Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat. Tanggal 26 dan 27 September 2019	Kota Bima	Kantor Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Provinsi NTB Tahun 2019. Tanggal 17 dan 18 Oktober 2019.
Loteng	Kantor Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Tanggal 29 dan 30 Oktober 2019.	Mataram	Kantor Lurah Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Tanggal 29 dan 30 Oktober 2019.
Lotim	Kantor Desa Sapit, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Tanggal 29 dan 30 Oktober 2019.	KLU	Kantor Desa Teniga, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Tanggal 29 dan 30 Oktober 2019.

- Sosialisasi anti Narkoba untuk kepala desa Kab/Kota Prov. NTB, telah dilaksanakan pada tanggal 26 dan 27 November 2019, bertempat di Hotel Puri Indah Mataram dengan peserta berjumlah 50 orang.
- Penyegaran Mentor dan Sekolah Perjumpaan Prov.NTB dengan peserta sebanyak 50 orang terdiri dari Mentor Provinsi Sekolah Perjumpaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mentor yang dimaksud adalah para pemerhati/relawan yang ikut peduli dan prihatin terhadap kondisi kehidupan sosial masyarakat NTB yang sudah mulai meninggalkan karakter budayanya.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyegarkan kembali metode-metode pendekatan sekolah perjumpaan yang kelak akan digunakan pada saat melakukan pendampingan di lapangan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 – 22 Mei 2019 bertempat di Hotel Puri Indah, Jalan Sriwijaya No. 132, Cilinaya, Cakranegara, Kota Mataram.

- Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Tim Anti Narkoba Provinsi NTB dengan peserta berjumlah 50 orang, terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan Instansi vertikal yang ada di provinsi NTB. Pelaksanaan Rakor telah dilaksanakan di Aula Kantor Bakesbangpoldagri Provinsi NTB pada 19 Maret 2019.
- Rapat koordinasi penyusunan Rencana Aksi Timdu P4GN. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 13 November 2019 bertempat di Hotel Lombok Garden yang diikuti oleh peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari Tim Terpadu P4GN Provinsi NTB dan pejabat Bakesbangpol Kab./Kota yang menangani P4GN.
- Rapat koordinasi pemetaan lokasi Desa Bersinar tahun 2020, Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 28 November 2019 bertempat di Hotel Lombok Garden yang diikuti oleh peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari unsur Bakesbangpol Kab./Kota, Polda NTB, BNNP NTB, Polres Kab./Kota se – NTB, BNNK se – NTB dan OPD terkait di Provinsi NTB, serta perwakilan dari Tim Sekolah Perjumpaan. (Lokasi pemetaan Desa Bersinar TA. 2020 terlampir (*Lampiran 3*).

Total pagu anggaran Rp. 2.137.895.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.009.547.897,- (94,00%) dan realisasi fisik 100%.

D. Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas

Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam politik, baik berpartisipasi dalam bentuk menyampaikan aspirasi atau hak-hak politiknya maupun ikut secara langsung menjadi bagian dari pesta politik itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan berdemokrasi. Karena berawal dari hal yang kecil inilah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin dan ke arah mana dan dengan cara bagaimana pemimpin

itu membawa suatu negara atau daerah untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu melalui Program Pendidikan Politik Masyarakat ini telah dilakukan berbagai rangkaian kegiatan sebagai berikut :

1.1 Penyuluhan pada masyarakat, terdiri dari :

- Fasiliatsi kepada 56 orang anggota Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
- Rapat Koordinasi Teknis Pokja IDI yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2019 di Hotel Grand Madani Jln. Udayana No. 20 Mataram NTB dengan peserta seluruh Tim Pokja IDI Provinsi NTB dengan jumlah sebanyak 50 orang.
- FGD Pokja Indeks Demokrasi Indonesia yang telah dilaksanakan pada 29 Juli 2019 di Aula BPS Provinsi NTB dengan sasaran peserta adalah Tim Pokja IDI Provinsi NTB dengan jumlah sebanyak 50 orang.
- Fasilitasi Tim pembinaan Keormasan Provinsi NTB sebanyak 29 orang.
- Peningkatan kapasitas dan partisipasi Ormas/LSM dalam pembangunan, merupakan suatu bentuk pertemuan yang dimaksudkan untuk memotivasi Ormas/LSM supaya ikut berkontribusi mambangun daerah melalui program atau kegiatan nyata sesuai tujuan di bentuknya Ormas/LSM yang tertuang dalam AD/ARTnya. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada pada tanggal 5 s.d 6 April 2019 di Fave Hotel Jalan Langko No. 21 – 23 Kel. Dasan Agung Baru Kec. Selaparang Kota Mataram dengan peserta berasal dari perwakilan unsur Ormas/LSM yang ada di wilayah NTB dengan jumlah sebanyak 50 orang.
- Sosioalisasi Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif Kegiatan Sosialisasi Pilpres/Pileg 2019 kepada Lintas Tokoh disamping dibiayai dari APBD Kesbangpoldagri Provinsi NTB juga merupakan alokasi dana Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi NTB periode 2014 – 2019. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
Kegiatan Sosialisasi Pilpres/Pileg 2019 pertama (1) pada tanggal 11 s.d 12 Januari 2019 dilaksanakan di Fave Hotel Jalan Langko No. 21 – 23 Kel. Dasan Agung Baru Kec. Selaparang Kota Mataram dengan peserta Lintas Tokoh yaitu Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat,

Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan yang ada di wilayah NTB dengan jumlah sebanyak 50 orang.

TEMA

“Membangun Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Cerdas Dan Berintegritas”

Kegiatan Sosialisasi Pilpres/Pileg 2019 ke dua (2), ke tiga (3) dan ke empat (4) kepada Lintas Tokoh dilaksanakan pada tanggal 30 s.d 31 Januari 2019, 16 s.d 17 Februari 2019 dan 23 s.d 24 Februari 2019 di Fave Hotel Jalan Langko No. 21 – 23 Kel. Dasan Agung Baru Kec. Selaparang Kota Mataram dengan peserta Lintas Tokoh adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan yang ada di wilayah NTB dengan jumlah sebanyak 50 orang.

TEMA

“PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT”

- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Keormasan dan Parpol, telah dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 16 Maret 2019 di Fave Hotel Jalan Langko No. 21 – 23 Kel. Dasan Agung Baru Kec. Selaparang Kota Mataram dengan peserta adalah perwakilan dari unsur Ormas dan Partai Politik yang ada di wilayah NTB dengan jumlah sebanyak 50 orang. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 960.451.940,- dengan realisasi sebesar Rp. 944.116.860,- (98,30%) dan realisasi fisik 100%. Sisa anggaran sebesar Rp. 16.335.080,- (1,7%) telah dikembalikan ke kas daerah.

1.2 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Kegiatan ini berupa perjalanan monitoring dan evaluasi terkait dengan bantuan/hibah bantuan sosial (bansos) kepada Ormas dan LSM dan Verifikasi bantuan hibah dan bantuan sosial dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi Rp 199.688.511,- dan realisasi fisik 100%.

1.3 Peningkatan peran Parpol dan Ormas, terdiri dari :

- Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi berkas bantuan keuangan parpol oleh tim sebagai dasar rekomendasi oleh TAPD untuk mengajukan dalam dokumen anggararan. Bantuan Keuangan Parpol 2019 dapat dilihat pada *Lampiran 4*
- Rapat persiapan dan hasil verifikasi bantuan keuangan oleh seluruh tim, dll.

Total pagu untuk kegiatan tersebut adalah sebesar pagu anggaran Rp. 88.048.000,- dan realisasi keuangan dan fisik 100%.

BAB V

PELAKSANAAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

Nilai APBD Murni Bakesbangpoldagri Provinsi NTB Tahun 2019 sebesar Rp. 16.324.016.500,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 5.006.689.000,- dan Belanja Langsung (BL) Rp. 11.317.327.500,-. Dengan adanya kebijakan perubahan anggaran di awal triwulan ketiga, alokasi dana untuk Bakesbangpoldagri Provinsi NTB yang tertuang dalam APBD Perubahan Tahun 2019 sebesar Rp. 16.634.116.500,- dengan rincian BTL Rp. 4.816.789.000,- dan BL sebesar Rp. 11.817.327.500,- terdapat pengurangan atau rasionalisasi anggaran sebesar Rp. 189.900.000,- untuk BTL, sedang pada BL terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Pagu Anggaran Murni dan Perubahan TA. 2019

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
5	BELANJA	16.324.016.500,00	16.634.116.500,00	310.100.000,00	1,90
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.006.689.000,00	4.816.789.000,00	(1.889.900.000,00)	(3,79)
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.006.689.000,00	4.816.789.000,00	(1889.900.000,00)	(3,79)
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	11.317.327.500,00	11.817.327.500,00	500.000.000,00	4,42
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.381.914.000,00	3.272.164.000,00	(109.750.000,00)	(3,25)
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.883.952.500,00	8.342.454.500,00	484.502.000,00	5,82
5 . 2 . 3	Belanja Modal	51.461.000,00	202.709.000,00	151.248.000,00	1,90

Adapun realisasi keuangan berdasarkan program dan kegiatan sebagaimana termuat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.2 Realiasi anggaran TA. 2019

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP.)	REALISASI		SISA ANGGARAN (RP.)
			(Rp.)	(%)	
1	2	3	11	12	14
I	Belanja Tidak Langsung	4.816.789.000,00	4.343.309.881,00	90,17	473.479.119,00
II	Belanja Langsung	11.817.327.500,00	11.197.971.192,00	94,76	619.356.308,00
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.050.082.180,00	1.046.868.097,00	99,69	3.214.083,00
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.038.000,00	887.000,00	85,45	151.000,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	73.455.481,00	71.631.081,00	97,52	1.824.400,00
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	80.252.000,00	80.252.000,00	100,00	-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	396.240.220,00	396.237.120,00	100,00	3.100,00
	Penyediaan alat tulis kantor	50.023.500,00	50.023.500,00	100,00	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.745.200,00	11.738.900,00	99,95	6.300,00

	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	104.960.000,00	104.090.000,00	99,17	870.000,00
	Penyediaan makanan dan minuman	60.000.000,00	59.994.500,00	99,99	5.500,00
	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	122.400.000,00	122.093.648,00	99,75	306.352,00
	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	149.967.779,00	149.920.348,00	99,97	47.431,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	414.409.000,00	399.704.633,00	96,45	14.704.367,00
	Pengadaan peralatan gedung kantor	51.461.000,00	49.633.000,00	96,45	1.828.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	176.700.000,00	164.721.633,00	93,22	11.978.367,00
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	-
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	151.248.000,00	150.350.000,00	99,41	898.000,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.600.000,00	12.800.000,00	82,05	2.800.000,00
	Peningkatan mental dan fisik aparatur	15.600.000,00	12.800.000,00	82,05	2.800.000,00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	243.036.380,00	243.018.300,00	99,99	18.080,00
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	64.414.880,00	64.400.000,00	99,98	14.880,00
	Penyusunan rencana kerja SKPD	178.621.500,00	178.618.300,00	100,00	3.200,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	19.700.000,00	19.700.000,00	100,00	-
	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	19.700.000,00	19.700.000,00	100,00	-
6	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	383.104.600,00	374.835.586,00	97,84	8.269.014,00
	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	233.269.400,00	228.206.300,00	97,83	5.063.100,00
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa	149.835.200,00	146.629.286,00	97,86	3.205.914,00
7	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	6.305.000.000,00	5.859.643.308,00	92,94	445.356.692,00
	Forum Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	6.305.000.000,00	5.859.643.308,00	92,94	445.356.692,00
8	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	2.137.895.400,00	2.009.547.897,00	94,00	128.347.503,00
	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	2.137.895.400,00	2.009.547.897,00	94,00	128.347.503,00
9	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1.248.499.940,00	1.231.853.371,00	98,67	16.646.569,00
	Penyuluhan kepada masyarakat	960.451.940,00	944.116.860,00	98,30	16.335.080,00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	200.000.000,00	199.688.511,00	99,84	311.489,00
	Peningkatan peran partai politik (parpol) dan organisasi masyarakat (ormas)	88.048.000,00	88.048.000,00	100,00	-
Jumlah Belanja		16.634.116.500,00	15.541.281.073,00	93,43	1.092.835.427,00

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Peran Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dalam meningkatkan kondusifitas daerah makin terasa penting sehingga perlu terus mendapatkan tambahan alokasi anggaran dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedepan yang semakin berat.
2. Realisasi anggaran sebesar 93,43% dengan rincian BTL (90,17%) dan BL (94,76%).
3. Keseluruhan program dan kegiatan tahun anggaran 2019 dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan pada tingkat pencapaian sasaran yang tepat.
4. Beberapa pejabat dan staf mendapatkan kenaikan pangkat setingkat di atasnya dapat makin meningkatkan kinerja Bakesbangpoldagri Provinsi NTB.
5. Kinerja pelaksanaan kegiatan di sekretariat cukup baik sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada 3 bidang teknis lainnya.
6. Jumlah konflik sosial Tahun 2019 sebanyak 7 kasus, lebih kecil dari target atau yang diperkirakan yaitu 21 kasus.
7. Beberapa kegiatan pembinaan dilaksanakan dengan sasaran kelompok masyarakat yang rentan terhadap perubahan kondisi sosial kemasyarakatan seperti kelompok pelajar, pemuda, wanita dsb.

B. SARAN

1. Pemerintah harus mampu mendorong upaya-upaya yang dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas ditengah-tengah pemuda, pelajar, dan mahasiswa untuk mencegah terjadinya konflik
2. Pengajuan permintaan tenaga staf dan tenaga fungsional yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik pengetahuan/kemampuan kerja maupun integritasnya.
3. Waktu penetapan Perubahan anggaran pada akhir tahun dirasakan sangat menghambat jalannya kegiatan, untuk itu jika dimungkinkan waktu penetapan perubahan anggaran dilaksanakan pada triwulan II.

4. Faktor kenyamanan lingkungan merupakan daya dukung yang strategis dan vital didalam berbagai sektor pembangunan, untuk itu diperlukan perhatian yang lebih khusus.

BAB VII

P E N U T U P

Demikian Laporan Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Semoga Laporan Tahunan ini dapat berguna atau sebagai bahan rujukan program/kegiatan dan bahan penetapan kebijakan dalam pelaksanaan tugas kedepan.

Mataram, Maret 2020

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri Propinsi NTB



Ir. H. MOHAMMAD RUM, MT

Pembina Utama Muda
NIP. 1966016 199402 1 001

